

**EVALUASI PROGRAM DANA BANTUAN PRESIDEN PRODUKTIF  
USAHA MIKRO BAGI PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH  
KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2021**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**GHINA KHAIRUNNISA  
NPM. 1816041027**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## ABSTRAK

### EVALUASI PROGRAM DANA BANTUAN PRESIDEN PRODUKTIF USAHAMIKRO BAGI PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2021

Oleh:  
GHINA KHAIRUNNISA

Banpres Produktif Usaha Mikro merupakan bagian dari program Kementerian Koperasi dan UKM yang ditunjukkan untuk mengatasi ekonomi nasional yang kemudian disingkat BPUM. Di masa pandemi, pelaku UMKM menghadapi beberapa kesulitan, seperti mencari bahan baku, penjualan yang menurun, modal yang menipis, produksi yang menurun, dan keterlambatan distribusi. Jika pandemi Covid-19 terus berlanjut, diperkirakan setidaknya setengah dari UMKM Indonesia akan mengalami kegagalan. Dalam rangka merevitalisasi perekonomian Indonesia, pemerintah telah memberikan insentif berupa program Banpres Produktif Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (BPUM) yang disalurkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan hasil program dana Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) bagi pelaku UMKM di Kota Bandar Lampung pada tahun 2021.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dengan melihat lima indikator ketepatan yaitu, efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) efektivitas pada pelaksanaan program BPUM Tahun 2021 tidak dapat diukur karena tidak adanya sistem monitoring, data dan dokumentasi yang jelas untuk mengetahui ketercapaian program BPUM di Kota Bandar Lampung Tahun 2021. 2) Efisiensi disimpulkan efisien karena sumber daya telah memadai. 3) Kecukupan dinilai telah cukup karena program BPUM sangat berperan dalam pengembangan dan permasalahan UMKM di masa pandemi. 4) Pemerataan BPUM belum dapat dikatakan merata pada pencapaian tujuan menyeluruh karena tujuan sasaran dari program BPUM belum dapat menyentuh seluruh pelaku usaha. 5) Responsivitas disimpulkan responsiv karena para pegawai dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung telah melayani dengan baik kepada seluruh pelaku usaha dan 6) Ketepatan disimpulkan kurang tepat karena masih terdapat penggunaan dana BPUM yang tidak tepat.

**Kata Kunci:** Efektivitas program, Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM), Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

## **ABSTRACT**

### **EVALUATION OF THE PRESIDENTIAL ASSISTANCE FUND PROGRAM FOR SMALL MEDIUM MICRO ENTERPRISES BANDAR LAMPUNG CITY IN 2021**

**By:**

**GHINA KHAIRUNNISA**

*The Productive Banpres for Micro Enterprises is part of the Ministry of Cooperatives and SMEs program aimed at overcoming the national economy, which is then abbreviated as BPUM. During the pandemic, MSME players faced several difficulties, such as finding raw materials, declining sales, diminishing capital, decreased production, and delays in distribution. If the Covid-19 pandemic continues, it is estimated that at least half of Indonesia's MSMEs will fail. In order to revitalize the Indonesian economy, the government has provided incentives in the form of Productive Presidential Assistance for Micro, Small and Medium Enterprises (BPUM) distributed by the Ministry of Cooperatives and SMEs of the Republic of Indonesia. The purpose of this study is to describe and analyze the implementation of the results of the Micro Business Productive Banpres (BPUM) fund program for MSMEs in Bandar Lampung City in 2021.*

*Data collection techniques are carried out through interviews, observation and documentation by looking at five indicators of accuracy namely, effectiveness, efficiency, adequacy, alignment, responsiveness, and precision. The results of this study indicate that 1) the effectiveness of implementing the BPUM program in 2021 cannot be measured because there is no monitoring system, clear data and documentation to determine the achievement of the BPUM program in Bandar Lampung City in 2021. 2) Efficiency is concluded to be efficient because resources are adequate . 3) Adequacy is considered sufficient because the BPUM program plays a very important role in the development and problems of MSMEs during the pandemic. 4) The distribution of BPUM cannot be said to be evenly distributed in achieving overall objectives because the target objectives of the BPUM program have not been able to touch all business actors. 5) Responsiveness is concluded as responsive because the Cooperative and UKM service employees of Bandar Lampung City have served well to all business actors and 6) Accuracy is concluded to be inappropriate because there is still inappropriate use of BPUM funds.*

**Keywords:** Program effectiveness, Productive Presidential Assistance for Micro Enterprises (BPUM), Micro Small and Medium Enterprises (UMKM)

**EVALUASI PROGRAM DANA BANTUAN PRESIDEN PRODUKTIF  
USAHA MIKRO BAGI PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH  
KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2021**

Oleh

**GHINA KHAIRUNNISA**

**Skripsi**

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
**SARJANA ADMINISTRASI NEGARA**

Pada

Jurusan Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**Judul Skripsi** : **EVALUASI PROGRAM DANA  
BANTUAN PRESIDEN PRODUKTIF  
USAHA MIKRO BAGI PELAKU  
USAHA MIKRO KECIL DAN  
MENENGAH KOTA BANDAR  
LAMPUNG TAHUN 2021**

**Nama Mahasiswa** : Ghina Khairunnisa


**Nomor Pokok Mahasiswa** : 1816041027

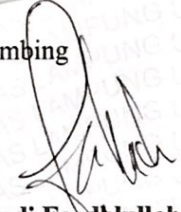
**Program Studi** : Ilmu Administrasi Negara

**Fakultas** : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

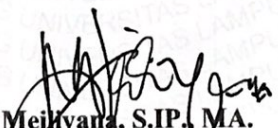
**MENYETUJUI**

1. Komisi Pembimbing

  
**Dewie Brima Atika, S.IP., M.Si**  
NIP. 19821212 200801 2 017

  
**Dodi Faedhlulloh, S.Sos., M.Si.**  
NIP. 19880712 201903 1 012

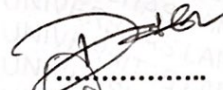
2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara

  
**Meilhyana, S.IP., M.A.**  
NIP. 19740520 200112 2 002

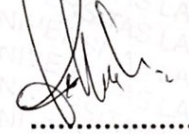
**MENGESAHKAN**

1. Tim penguji:

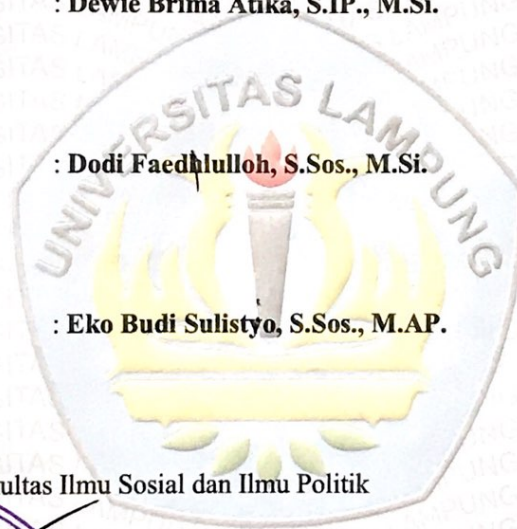
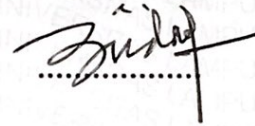
Ketua : **Dewie Brima Atika, S.IP., M.Si.**



Sekretaris : **Dodi Faedhlulloh, S.Sos., M.Si.**



Penguji : **Eko Budi Sulisty, S.Sos., M.AP.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**Drs. Ida Nurhaida, M.Si.**  
NIP. 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **24 Januari 2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 24 Januari 2023  
Yang membuat pernyataan.

  
Ghina Kha  
NPM. 1816041027



## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Ghina Khairunnisa, lahir di Bandar Lampung pada 22 Oktober 2000. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Ahmad Dafrika dan Ibu Susana serta memiliki kakak yang bernama Annisa Anastasya dan Ahmad Imam Al Ihsan. Pendidikan yang ditempuh oleh penulis dimulai dari Taman Kanak-Kanak Kartika II-6 yang diselesaikan pada tahun 2005. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Dasar (SD) Kartika II-6 yang diselesaikan pada tahun 2012 setelah itu melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) IT Fitrah Insani Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2015. Kemudian meneruskan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 9 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2018.

Pada tahun 2018 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, melalui jalur SNMPTN. Penulis mengikuti organisasi Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (Himagara). Pada periode Februari-Maret 2021 penulis melaksanakan KKN di Kelurahan Gunung Agung, Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung selama 40 hari. Setelah itu pada bulan Agustus 2021 – Januari 2022 penulis mengikuti Program Magang Merdeka di Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung selama 6 bulan. Setelah itu saat proses penyelesaian skripsi, peneliti diterima bekerja di UKM Indonesia.



## MOTTO

*Cukuplah Allah (menjadi penolong) bagi kami dan dia sebaik-baiknya pelindung*

*(Q.S Ali Imran: 173)*

*Lakukanlah kebaikan sekecil apapun, karena kau tak pernah tahu seberapa banyak yang akan membawamu ke Surga*

*(Imam Hasan Al-Basri)*

*If you can dream it, you can do it*

*(Walt Disney)*

*You don't have to be great to start, but you have to start to be great*

*(Joe Sabah)*

## **PERSEMBAHAN**

*Dengan mengucap Alhamdulillah atas Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rasa syukur dan terima kasih yang tulus, kupersembahkan skripsi ini kepada:*

*Abi dan Umi Tersayang*

*Bapak Ahmad Dafrika dan Ibu Susana*

*Segala pencapaian ini tidak terlepas dari do'a Abi dan Umi panjatkan di setiap sujud. Terima kasih untuk banyak pengorbanan, bimbingan, dukungan yang tak ada habisnya serta kasih sayang yang tidak terhingga yang kalian berikan kepadanya. Saya selalu bersyukur kepada Allah karena dilahirkan dari orang tua yang hebat seperti Abi dan Umi.*

*Ences dan Abang Tersayang*

*Annisa Anastasya dan Ahmad Imam Al-Ihsan*

*Terima kasih untuk dukungan dan do'a hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Mari kita berjuang bersama untuk membuat Abi dan Umi bangga dan bahagia.*

*Keluarga Besar dan Sahabat*

*Terima kasih sudah menemani dalam setiap suka dan duka serta selalu mendukung. Semoga doa baik akan dikabulkan dan berbalik juga pada kalian.*

*Para Pendidik Jurusan Ilmu Administrasi Negara*

*Terima kasih sudah membimbing dengan penuh ketulusan dan memberikan bekal ilmu serta pesan moral yang bermanfaat. Pengalaman berharga ini tidak akan saya lupakan.*

*Serta*

*Almamater Tercinta Universitas Lampung*

## SANWACANA



Alhamdulillah puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah dan ridho-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Evaluasi Program Dana Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bandar Lampung Tahun 2021”**. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Administrasi Negara (S.A.N) di Universitas Lampung. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari banyak sekali kesulitan yang dihadapi dari awal hingga selesai penulisannya. Namun berkat bantuan, bimbingan, dorongan serta saran dari berbagai pihak, segala kesulitan tersebut Alhamdulillah dapat diatasi dengan baik. Untuk itu pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Ibu Dewie Brima Atika, S.IP., M.Si, selaku dosen pembimbing utama. Terima kasih bu Dewie untuk segala bimbingan, saran serta masukan yang Ibu berikan kepada saya untuk saya dapat memperbaiki skripsi. Seluruh saran dan masukan yang telah bu Dewie berikan merupakan sebuah wawasan dan pelajaran baru bagi saya. Semoga keberkahan dan kesehatan selalu melimpahi Ibu.
2. Bapak Dodi Faedlulloh, S.Sos., M.Si, selaku dosen pembimbing kedua. Terima kasih pak Dodi untuk kesediannya membimbing dan memberikan saya ilmu yang bermanfaat sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi saya. Semoga Bapak senantiasa diberikan keberkahan, kesehatan dan kebahagiaan.
3. Bapak Eko Budi Sulisty, S.Sos., M.AP, selaku dosen penguji serta pembimbing akademik. Terima kasih pak Eko untuk kesediannya mengoreksi skripsi saya dari seminar proposal hingga skripsi ini dapat selesai, memberikan masukan dan tambahan ilmu bagi saya yang pak Eko berikan. Terima kasih juga pak telah membimbing saya dari masa mahasiswa baru

sampai sekarang. Saran dan masukan dari Bapak sangat berguna bagi perjalanan perkuliahan saya dari awal hingga akhir. Semoga keberkahan dan kesehatan selalu melimpahi Bapak.

4. Ibu Meiliyana, S.IP., M.A, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
5. Ibu Ita Prihantika, S.Sos., M.A, selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
6. Seluruh Dosen Ilmu Administrasi Negara, terima kasih atas dedikasi yang diberikan dalam mengajar para mahasiswa, Semoga ilmu bermanfaat yang telah diberikan dapat menjadi sebuah ladang pahala yang terus mengalir seumur hidup Bapak dan Ibu.
7. Seluruh Staf Ilmu Administrasi Negara, terima kasih untuk selalu membantu mengurus berbagai keperluan administrasi dari awal mahasiswa baru hingga lulus.
8. Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung (Pak Mirza, Bu Mutia, Bu Noviana, Bu Muryati, Pak Arul serta seluruh pegawai di Bidang pengembangan UMKM), terima kasih sudah menerima saya dengan baik dan mengajarkan banyak ilmu saat saya magang selama 6 bulan serta membantu dalam memperoleh data saat penyusunan skripsi hingga selesai. Semoga kebaikan Bapak dan Ibu di balas dengan lebih baik oleh Allah SWT.
9. Abi, Umi, Ences, Abang, Rajo, Kak Ananda, Arundaya, Zaynata dan seluruh saudara-saudaraku, terima kasih banyak sudah mendukung, mendoakan, memberi masukan dan menghibur. Terutama kedua orang tuaku Abi dan Umi yang sudah banyak berkorban untuk penulis agar bisa menyelesaikan pendidikan dari jenjang TK hingga perkuliahan ini. Semoga Abi Umi sehat selalu dan aku bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk bahagain Abi dan Umi.
10. Farhan Darmawan, terima kasih selalu menemani saya dari awal perkuliahan mahasiswa baru pada empat tahun yang lalu hingga saat ini saya dapat menyelesaikan skripsi saya. Terima kasih selalu berusaha memberikan yang terbaik disetiap moment yang ada, untuk segala bentuk kasih sayang yang

diberikan, memberi *support*, dan selalu ada ketika suka dan duka. Semoga segala niat baik dapat dipermudah kedepannya.

11. Putri Febriany, Qorry Rahma Intan Palupi, dan Angginie Putri Arieza Hakim, terima kasih sudah setia menemani saya dari jenjang SMP hingga saat ini sudah 10 tahun lamanya. Semoga lelah yang kita jalani menjadi Lillah.
12. Bottom-ku Daniella Savira, Nurlika Isnovianti, Salma Hanifah, Adellia Talitha, Tiara Tiur, Raida Nabila, Tasya Innama, Milian Devialesti, dan Dea Carolin, terima kasih telah memberikan warna di dunia perkuliahan saya, saya bersyukur telah melewati moment suka dan duka bersama kalian. Tidak ada perjuangan yang sia-sia. Semoga kita semua kaya raya.
13. Teman-teman Angkatan ANDALUSIA terutama kelas reguler A, terima kasih untuk moment kebersamaan selama kurang lebih 4 empat tahun ini, semoga kita semua dapat menggapai cita-cita yang kita inginkan dan dapat bermanfaat bagi semua orang.
14. Serta seluruh pihak yang membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi tanpa terkecuali, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
15. *Last but not least, i wanna thank me, i wanna thank me for believing in me, i wanna thank me for doing all this hard work, i wanna thank me for having no days, i wanna thank me for never quitting and i wanna thank me for always being strong.*

Akhir kata, penulis meminta maaf atas segala kekurangan dan ketidak sempurnaan dalam penulisan skripsi ini, karena penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Penulis sangat mengharapkan masukan, kritik dan saran agar karya tulis ini selanjutnya dapat lebih baik lagi. Penulis berharap semoga Allah Subhawahu wa Ta'ala selalu memberikan keberkahan bagi kalian dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua Aamiin.

Bandar Lampung, 24 Januari 2023

Penulis

Ghina Khairunnisa

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	4
1.3 Rumusan Masalah .....	5
1.4 Tujuan Penelitian .....	5
1.5 Manfaat Penelitian .....	5
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>6</b>
2.1 Penelitian Terdahulu .....	6
2.2 Kebijakan Publik .....	8
2.3 Evaluasi Kebijakan .....	10
2.3.1 Teori Evaluasi .....	11
2.3.2 Pendekatan Terhadap Evaluasi .....	13
2.4 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) .....	14
2.4.1 Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) .....	14
2.4.2 Klasifikasi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) .....	14
2.4.3 Kriteria Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) .....	15
2.4.4 Ciri dan Karakteristik Usaha Mikro Kecil dan Menengah .....	16
2.4.5 Kekuatan dan Kelemahan Usaha Mikro Kecil Menengah .....	17
2.5 Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) .....	18
2.6 Kerangka Pemikiran .....	20
<b>III. METODE PENELITIAN</b> .....	<b>22</b>
3.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian .....	22
3.2 Fokus Penelitian .....	22
3.3 Lokasi Penelitian .....	23
3.4 Jenis dan Sumber Data .....	23

3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	24
3.6 Teknik Analisis Data .....	26
3.7 Teknik Keabsahan Data.....	28
<b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>31</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	31
4.1.1 Profile Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung.....	31
4.1.2 Tugas Pokok Fungsi Dinas Koperasi UKM Bandar Lampung .....	32
4.1.3 Visi dan Misi Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung ...	32
4.1.4 Tugas Pokok Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung ...	34
4.1.5 Fungsi Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung.....	34
4.1.6 Struktur Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung .....	35
4.2 Hasil dan Pembahasan .....	35
4.2.1 Hasil.....	35
4.2.2 Pembahasan .....	63
<b>V. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>80</b>
5.1 Kesimpulan.....	80
5.2 Saran .....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>82</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Data UMKM Kota Bandar Lampung Perkecamatan Tahun 2021 .....	3
Tabel 2	Penelitian Terdahulu .....	6
Tabel 3	Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) .....	16
Tabel 4	Informan Penelitian.....	26
Tabel 5	Pelaku Usaha Kota Bandar Lampung Pendaftar BPUM Tahun 2020-2021 .....	40
Tabel 6	Komposisi Pegawai Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung Menurut Jenis Kelamin 2021 .....	42
Tabel 7	Penggunaan Dana BPUM .....	48
Tabel 8	Output Pelaksanaan.....	57
Tabel 9	Kelompok Sasaran dan Dampak Perubahan Program BPUM .....	59
Tabel 10	Tahap Penyaluran BPUM .....	62
Tabel 11	Verifikasi Berkas Pendaftaran Program BPUM .....	64
Tabel 12	Perbandingan Hasil Yang Diharapkan dan Hasil Sesungguhnya .....	65



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Pertumbuhan Perekonomian di Indonesia.....	2
Gambar 2	Alur Pencairan Dana BPUM.....	20
Gambar 3	Kerangka Pemikiran.....	21
Gambar 4	Teknik Analisis Gambar.....	27
Gambar 5	Struktur Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung.....	35
Gambar 6	Syarat Usulan Pelaku Usaha Penerima Program BPUM.....	39
Gambar 7	Pengumpulan Berkas Pendaftaran BPUM di Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung.....	42
Gambar 8	Pelatihan <i>Branding Product</i> bagi UMKM.....	48
Gambar 9	e-FORM BRI Penerima BPUM.....	52
Gambar 10	Pendaftaran Diri Program BPUM di Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung.....	56
Gambar 11	Himbauan BPUM di Kantor Dinas Koperasi dan UKM.....	66
Gambar 12	Kegiatan Koordinasi Optimalisasi Program BPUM.....	68
Gambar 13	Perbandingan UMKM Sebelum dan Sesudah Mendapatkan Dana BPUM.....	70
Gambar 14	Pelayanan Kepada UMKM.....	76
Gambar 15	Penggunaan Dana Yang Tepat Dapat Mempertahankan Usaha.....	79

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Banpres Produktif Usaha Mikro merupakan bagian dari program Kementerian Koperasi dan UKM yang ditujukan untuk mengatasi ekonomi nasional yang kemudian disingkat BPUM. Kementerian Koperasi dan UKM hanya memberikan bantuan BPUM melalui penyalur Bank BRI kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk membantu mereka bertahan dalam lingkungan ekonomi, khususnya di masa pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 berimplikasi pada kehidupan ekonomi, sosial, dan politik hampir semua bangsa, termasuk Indonesia. Sektor yang terkena dampak pandemi Covid-19 adalah transportasi, pariwisata, perdagangan, kesehatan, dan lain-lain, tetapi sektor ekonomi yang terkena dampak paling parah (Susilawati et al., 2020).

Menurut survey BPS tahun 2020, sebagaimana dikutip dari situs Kementerian Keuangan Republik Indonesia, sekitar 69,02% UMKM mengalami masalah permodalan selama Covid-19. Apalagi, per Oktober 2020, menurut Laporan Pengaduan ke Kementerian Koperasi dan UKM RI, sebanyak 39,22% UMKM mengalami kendala permodalan selama wabah Covid-19.

Di masa pandemi, pelaku UMKM menghadapi beberapa kesulitan, seperti mencari bahan baku, penjualan yang menurun, modal yang menipis, produksi yang menurun, dan keterlambatan distribusi. Jika pandemi Covid-19 terus berlanjut, diperkirakan setidaknya setengah dari UMKM Indonesia akan mengalami kegagalan. Dalam rangka merevitalisasi perekonomian Indonesia, pemerintah telah memberikan insentif berupa program Banpres Produktif Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (BPUM) yang disalurkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Selain itu, 12 juta

pengusaha mikro telah menerima total 17,34 Triliun dalam bentuk insentif di bawah program BPUM. Inisiatif ini tidak hanya sebagai bentuk rasa terima kasih kepada para pelaku UMKM yang berperan penting dalam kemajuan ekonomi Indonesia, tetapi juga sebagai salah satu bentuk pemulihan ekonomi. Hibah pemerintah sebesar Rp. 2.400.000,- sebagai tambahan modal segera disetorkan ke rekening masing-masing penerima BPUM melalui program BPUM. Sasaran ini ditujukan bagi para pengusaha mikro yang usahanya terhambat oleh Covid-19, sehingga mengurangi pendapatan mereka dan mempersulit mereka untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.

UMKM memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia, salah satunya adalah untuk menghasilkan dan meningkatkan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran yang tinggi. Menurut website Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia, jumlah UMKM pada tahun 2015 sekitar 59,2 juta unit dan jumlah UMKM pada tahun 2018 sekitar 64,2 juta unit. Akibat wabah Covid-19, perekonomian Indonesia mengalami kontraksi di tahun 2020 yang berdampak pada usaha besar maupun kecil. Di awal tahun 2020, pandemi Covid-19 merebak. Virus ini mengancam kesehatan manusia dan melumpuhkan ekonomi Indonesia karena Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yang mendorong individu untuk lebih banyak berada di rumah untuk menghindari Covid-19. Pembatasan PSBB melumpuhkan pelaku UMKM dengan membatasi pergerakan konsumen.

**Gambar 1**  
**Pertumbuhan Perekonomian di Indonesia**



*Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)*

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan dan tanggung jawab utama dalam pembangunan NKRI, sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Dalam sistem NKRI, pemerintah dapat melakukan berbagai upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan peran masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip khusus masing-masing daerah. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 yang mengatur tentang UMKM telah diakui arti penting UKM bagi perekonomian nasional. Pada Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1 Angka 10 berbunyi: "Pembangunan adalah upaya Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan UMKM melalui pemberian kemudahan, pembinaan, pendampingan, dan penguatan. bantuan untuk tumbuh dan meningkatkan kemampuan dan daya saing mereka. Dengan adanya undang-undang ini, jelas bahwa penyelenggara otonomi daerah memiliki landasan hukum yang kokoh bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan memberikan keleluasaan kepada pelaku usaha untuk beroperasi sesuai dengan undang-undang yang berlaku".

Berikut ini data UMKM berdasarkan Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Data UMKM Kota Bandar Lampung Perkecamatan Tahun 2021**

No	Kecamatan	Usaha Mikro (0 s/d Rp. 50.000.000)	Usaha Kecil (>Rp.50.000.000 s/d Rp.500.000.000)	Usaha Menengah (>Rp.500.000.000 s/d Rp.10.000.000.000)	Jumlah UMKM (unit)
1	Teluk Betung Barat	1.562	654	220	2.436
2	Teluk Betung Timur	1.405	788	301	2.494
3	Teluk Betung Selatan	1.743	798	236	2.777
4	Bumi Waras	1.930	686	271	2.887
5	Panjang	2.125	917	268	3.310
6	Tanjung Karang Timur	1.713	712	246	2.671

7	Kedamaian	1.857	732	287	2.876
8	Teluk Betung Utara	2.043	636	291	2.970
9	Tanjung Karang Pusat	3.164	893	342	4.399
10	Enggal	1.672	945	240	2.857
11	Tanjung Karang Barat	1.656	794	241	2.691
12	Kemiling	2.837	856	232	3.925
13	Langkapura	1.465	721	261	2.447
14	Kedaton	1.913	845	309	3.067
15	Rajabasa	1.709	714	270	2.693
16	Tanjung Senang	1.487	789	326	2.602
17	Labuhan Ratu	2.121	826	257	3.204
18	Sukarame	1.860	915	267	3.042
19	Sukabumi	1.514	676	316	2.506
20	Way Halim	2.200	683	266	3.149
Jumlah		37.979	15.580	5.447	59.048
Jumlah Usaha Mikro dan Kecil		59.048			

*Sumber: Data Dinas Koperasi dan UKM 2021*

Dari permasalahan yang ada maka terdapat pertanyaan apakah adanya BPUM sudah efektif membantu para pelaku usaha karena pelaksanaannya yang dilakukan secara cepat, selain itu apakah sudah merata bantuan tersebut disalurkan kepada para pelaku usaha yang kesulitan dalam mempertahankan usahanya di Kota Bandar Lampung terutama pada masa pandemi Covid-19.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dan melalui tindak nyata secara langsung di Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung maka teridentifikasi masalah yaitu adanya program Banpres Produktif Usaha Mikro Kecil Menengah (BPUM) terjadi ketidakmerataan penyaluran dana terhadap pelaku UKM di Kota Bandar Lampung. Peneliti menemukan ketidakmerataan terhadap penyaluran dana program BPUM yang dibuktikan dengan ditemukannya pelaku usaha yang mendapatkan BPUM lebih dari sekali sedangkan masih ada pelaku usaha yang belum pernah menerima bantuan BPUM. Selain itu, adanya tumpang tindih data juga menjadi salah satu penyebab ketidakmerataan penyaluran dana BPUM.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yakni, “Bagaimana hasil pelaksanaan program Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) di Kota Bandar Lampung tahun 2021?”

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh hasil pelaksanaan program dana Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) bagi pelaku UMKM di Kota Bandar Lampung pada tahun 2021”.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan yakni:

a) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang dapat digunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan Ilmu Administrasi Negara khususnya tentang Kebijakan Publik.

b) Manfaat Praktis

- 1) Menjadi masukan yang berarti bagi para pemangku kebijakan khususnya Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia yang berhubungan dengan kebijakan program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM).
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumber informasi dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pemerintah dalam program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM).

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Penelitian Terdahulu

Penyajian informasi mengenai penelitian terdahulu perlu dilakukan karena untuk menunjukkan keterbaruan dari penelitian yang dilakukan. Dalam situasi ini, penelitian tentang program pengembangan UMKM telah digali secara mendalam, meskipun hasil dari setiap penelitian berbeda-beda. Untuk memisahkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, peneliti mendalami Program (BPUM) yang dikembangkan untuk mendukung pelaku UMKM di masa pandemi Covid-19.

**Tabel 2**  
**Penelitian Terdahulu**

Judul	Hasil Penelitian
“Evaluasi Kebijakan Pengembangan UKM di Kota Bandung Melalui Program Bantuan Walikota Untuk Kemakmuran (Bawaku Makmur)” (Kastaman, 2011)	Hasil evaluasi program Bawaku Makmur tahun 2007-2011 menunjukkan bahwa program tersebut secara fundamental sehat; Namun, jika program serupa akan dilaksanakan kembali, beberapa perbaikan harus dilakukan, misalnya program tersebut sebaiknya tidak dalam bentuk hibah melainkan dana bergulir atau pinjaman lunak yang harus dikembalikan tanpa bunga. Lalu untuk perbaikan program terutama diarahkan dalam bentuk pendampingan pada calon penerima sebelum dan sesudah

	bantuan diberikan, pelaksanaan program perlu ditunjang dengan kegiatan monitoring, serta peningkatan daya beli masyarakat kota secara signifikan.
Evaluasi Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Kudus	Implementasi kebijakan UMKM Kabupaten Kudus berjalan dengan baik. Dari komunikasi pemerintah-UKM. Disposition atau sikap pemerintah terhadap pelaku UMKM dimana pemerintah memiliki komitmen yang tinggi untuk memajukan UMKM di Kabupaten Kudus, Adanya struktur birokrasi implementasi kebijakan yang jelas sehingga tidak terjadi tumpang tindih hanya implementasi di lapangan kebijakan UMKM di Kabupaten Kudus belum dapat menjangkau seluruh UMKM di Kabupaten Kudus dan masih banyak masyarakat yang belum menikmati fasilitas atau kebijakan pemberdayaan UMKM.
Evaluasi Kebijakan Program Pinjaman Modal Kredit Bergulir Untuk Pelaku Usaha Kecil dan Menengah Pada Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM di Kabupaten Kutai Barat	Kebijakan Pinjaman Kredit Modal Yang di UMKM Kementerian Perindustrian UKM, koperasi, dan perdagangan kabupaten Kutai Barat sangat bermanfaat. Tanda-tanda itu efektif diketahui dari hasil studi Mendistribusikan pinjaman modal Kredit bergulir berlanjut kesulitan teknis dan admin sehingga kredit pinjaman modal bagi pelaku usaha Mikro, kecil, dan menengah belum dapat diselesaikan sesuai yang diharapkan.

*Sumber: Diolah oleh peneliti, 2021*



Keterbaruan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya ialah terkait waktu penelitian yang dilaksanakan pada situasi pandemi Covid-19. Dalam hal ini, situasi pandemi memberi dampak buruk kepada para pelaku usaha yang mengakibatkan pemerintah harus membuat kebijakan sebagai salah satu cara untuk mempertahankan UMKM di masa Covid-19.

Keterkaitan penelitian terdahulu dan penelitian ini terdapat kesamaan dan menjadi inspirasi bagi penulis untuk dapat menyelesaikan penelitian yaitu penggunaan metode kualitatif yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah, menjadikan para pelaku UMKM sebagai objek penelitian, dan menggambarkan program kebijakan untuk UMKM dapat bertahan.

## **2.2 Kebijakan Publik**

Menurut James Anderson dalam Winarno (2012), kebijakan adalah serangkaian tindakan yang dirancang oleh satu atau lebih aktor dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu isu atau masalah. Gagasan kebijakan ini dianggap dapat diterima karena berfokus pada apa yang sebenarnya dilakukan, bukan pada apa yang direncanakan atau diusulkan pemerintah untuk dicapai.

Selain itu, Effendi berpendapat dalam Syafiie (2006) bahwa kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai pemahaman tentang sebab, akibat, dan kinerja kebijakan dan program publik. Sementara itu, pengetahuan dalam kebijakan publik adalah proses penyediaan informasi dan pengetahuan bagi eksekutif, legislator, hakim, dan masyarakat umum yang berharga dalam proses pengembangan kebijakan dan dapat meningkatkan kinerja kebijakan.

Hal tersebut selaras dengan definisi lainnya dikemukakan oleh Wahab dalam Ramdhani (2017:3) menyatakan bahwa: a) Kebijakan publik sebagai tindakan sadar yang ditujukan untuk meraih suatu tujuan, bukan tindakan yang acak dan tanpa disengaja untuk dilakukan. b) Kebijakan publik terdiri dari beberapa tindakan yang saling terkait dengan pola yang jelas yang mengarah pada pencapaian tujuan yang jelas dan dilakukan oleh pemerintah

dan keputusan berdasarkan kesepakatan bersama bukan keputusan yang berdiri sendiri b) Kebijakan publik terdiri dari beberapa tindakan yang saling terkait dengan pola yang jelas yang mengarah pada pencapaian tujuan yang jelas dan dilakukan oleh pemerintah dan keputusan berdasarkan kesepakatan bersama bukan keputusan yang berdiri sendiri. c) kebijakan publik yang berkaitan dengan kegiatan/tindakan yang dilakukan secara sadar dan terukur oleh pemerintah di bidang tertentu. d) Kebijakan publik dapat bermanfaat atau negatif, tergantung pada apakah kebijakan tersebut sesuai dengan aturan tindakan pemerintah atau pilihan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan apapun.

Selanjutnya menurut Dwiyanto dalam Muhiddin (2017:39) kebijakan publik perlu dikaitkan dengan kepentingan masyarakat, kebijakan publik melibatkan proses memilih dan mengkategorikan pilihan terbaik untuk memecahkan masalah tertentu dalam masyarakat. Berdasarkan penjelasan mengenai teori-teori kebijakan publik tersebut didapatkan relasi ataupun terdapat satu garis yang mengatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu tindakan sadar yang dilakukan oleh pemerintah dengan didasarkan pada sebuah pedoman pedoman, kebijakan publik juga merupakan hasil dari kesepakatan para pemangku kepentingan yang bertujuan untuk memecahkan suatu permasalahan sehingga dapat membantu perbaikan dalam tatanan masyarakat.

Berlandaskan definisi dan pandangan para ahli di atas, dapat dikatakan bahwa kebijakan publik terdiri dari tindakan-tindakan tertentu yang dibuat oleh pemerintah atau pegawai pemerintah. Setiap kebijakan pemerintah pasti memiliki tujuan, agar kebijakan publik efektif untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Agar pemerintah dapat menjalankan perannya sebagai pelayan publik, maka mutlak diperlukan adanya kebijakan publik.

### 2.3 Evaluasi Kebijakan

Tanpa evaluasi, suatu kebijakan publik tidak dapat ditinggalkan. Mengevaluasi kemandirian kebijakan publik dalam mencapai tujuannya adalah tujuan penilaian kebijakan. Akibatnya, penilaian merupakan komponen penting dari proses pembuatan kebijakan publik (Winarno, 2012).

Evaluasi adalah proses yang sistematis dan irasional dalam mengumpulkan, meringkas, menganalisis, dan menyajikan informasi tentang suatu program untuk digunakan dalam menentukan pilihan, mengembangkan kebijakan, dan merencanakan program selanjutnya (Widoyoko, 2012). Sementara evaluasi juga merupakan penelitian untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi berharga tentang item evaluasi, menilainya, dan membandingkannya dengan indikator evaluasi. Oleh karenanya, temuan tersebut digunakan untuk membuat penilaian tentang hal yang dievaluasi (Wirawan, 2012).

Berdasarkan pengetahuan sebelumnya, dapat diartikan bahwa evaluasi adalah proses sistematis yang mencoba mengumpulkan, mengevaluasi, dan memberikan informasi berharga dengan tolok ukur, dan bahwa hasil penilaian dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan.

Menurut Muhadjir dalam Widodo (2008), evaluasi kebijakan publik adalah suatu proses yang menilai sejauh mana suatu kebijakan publik dapat memberikan hasil, yaitu dengan membandingkan hasil yang diperoleh dengan maksud atau tujuan dari kebijakan publik yang ditetapkan. Evaluasi dilakukan karena menurut Lester dan Stewart dalam (Winarno, 2012), tidak semua proyek kebijakan publik mencapai outcome yang diharapkan. Adalah umum bagi inisiatif pemerintah untuk tidak mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan demikian, tujuan penilaian kebijakan adalah untuk menyelidiki alasan kegagalan suatu kebijakan atau untuk menentukan apakah suatu kebijakan publik telah memberikan dampak yang diinginkan.

Selain itu, Jones berpendapat dalam (Tangkilan, 2003) bahwa meninjau kebijakan publik memerlukan penyelesaian tinjauan untuk mengurangi konsekuensi yang tidak diinginkan. Dalam proses evaluasi suatu kebijakan, pertanyaan mendasar meliputi :“Apakah hasilnya benar-benar diinginkan? Bagaimana hasilnya? Bagaimana tanggapan dari berbagai kalangan di masyarakat? Bagaimana lokasi dan kondisi lapangan? Bagaimana dukungan legislatif? Bagaimana sikap kelompok-kelompok yang ada?”.

Menurut definisi yang diberikan oleh para ahli tersebut, evaluasi kebijakan merupakan tahapan akhir yang krusial dari suatu kebijakan dan prosedur untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan tersebut. Penilaian kebijakan juga berfungsi untuk menetapkan apakah suatu kebijakan sesuai dengan keinginan atau tidak, untuk memutuskan kebijakan masa depan yang akan diberlakukan.

### **2.3.1 Teori Evaluasi**

Kebijakan berhasil atau gagal dinilai dari indikator-indikator yang telah dikembangkan. William Dunn (Subarsono, 2013) mengembangkan enam indikator atau kriteria evaluasi mencakup sebagai berikut:

1. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti tercapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas biasanya sebanding dengan perbedaan antara hasil prediksi dan hasil aktual. Sejauh mana suatu opsi memberikan efek yang diinginkan atau mencapai tujuan tindakan.

2. Efisiensi

Mengenai jumlah pekerjaan yang diperlukan untuk mencapai tingkat efektivitas tertentu. Biaya per unit produk atau layanan sering digunakan untuk mengukur efisiensi. Efisien mengacu pada kebijakan yang memberikan kemanjuran paling tinggi dengan biaya terendah.

### 3. Kecukupan

Dalam hal kecukupan kebijakan publik, dapat diklaim bahwa tujuan yang dicapai telah dianggap memadai dalam berbagai cara. Efektivitas masih terikat pada kecukupan dengan menilai atau mengantisipasi sejauh mana opsi yang tersedia dapat memenuhi persyaratan, nilai, atau peluang sambil mengatasi tantangan.

### 4. Perataan

Dengan memberikan dan mencapai keadilan melalui tujuan kebijakan publik, kesetaraan dalam kebijakan publik dapat dianggap bermakna. Kebijakan yang berorientasi pemerataan adalah kebijakan yang hasil atau upayanya tersebar secara merata. Jika biaya dan manfaat didistribusikan secara merata, suatu program mungkin efektif, efisien, dan memadai. Keadilan penting untuk kesetaraan.

### 5. Responsivitas

Dalam kebijakan publik, daya tanggap dapat dikatakan sebagai reaksi dari suatu kegiatan, yang merujuk pada tanggapan sasaran kebijakan terhadap pelaksanaan suatu kebijakan. Daya tanggap mengacu pada sejauh mana suatu kebijakan dapat memenuhi persyaratan, kepentingan, atau nilai-nilai dari kelompok individu tertentu. Keberhasilan suatu kebijakan dapat diukur dengan bagaimana publik bereaksi terhadap implementasinya setelah memproyeksikan dampaknya. Selain itu, reaksi masyarakat setelah efek kebijakan itu mulai bisa baik atau negatif. Kriteria daya tanggap signifikan karena analisis yang memenuhi semua kriteria lain (efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan kesamaan) tetapi tidak menjawab kebutuhan riil orang-orang yang seharusnya mendapat manfaat dari suatu kebijakan gagal.

### 6. Ketepatan

Pada fase ini, keberhasilan suatu kebijakan diukur dari sejauh mana tujuan kebijakan telah tercapai, bermanfaat dan bernilai bagi khalayak sasaran, serta berpengaruh terhadap perubahan yang konsisten dengan tujuan kebijakan.

### 2.3.2 Pendekatan Terhadap Evaluasi

Menurut (Dunn, 2003) membagi pendekatan dalam evaluasi ke dalam tiga bentuk:

a) Evaluasi Semu

Evaluasi semu adalah metodologi yang menggunakan metode deskriptif untuk menciptakan informasi yang akurat dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan, tanpa berusaha untuk menentukan keuntungan atau nilai dari hasil tersebut kepada orang, kelompok, atau masyarakat. Anggapan di balik quasi-evaluasi adalah bahwa ukuran manfaat atau nilai adalah bukti diri atau tidak kontroversial.

b) Evaluasi Formal

Evaluasi formal (*formal evolution*) ialah teknik yang memakai metode deskriptif untuk menciptakan informasi yang akurat dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan. Akan tetapi menilai hasil tersebut berdasarkan tujuan program kebijakan yang telah dicanangkan secara eksplisit oleh pembuat kebijakan dan pengelola program. Premis utama dari penilaian formal yakni tujuan dan sasaran yang diungkapkan secara resmi merupakan ukuran yang dapat diterima dari manfaat atau nilai kebijakan program.

c) Evaluasi Keputusan Teoretis

Evaluasi keputusan teoretis (*decession theoretic evaluation*) ialah pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipercaya dan valid mengenai hasil kebijakan yang secara eksplisit dievaluasi oleh berbagai pelaku kebijakan. Perbedaan utama antara evaluasi keputusan teoretis, dan evaluasi semu dan evaluasi formal, yakni evaluasi keputusan teoretis berusaha mengungkapkan dan memperjelas tujuan dan sasaran yang disembunyikan atau dinyatakan dari para pelaku kebijakan. Kondisi ini menyiratkan bahwa tujuan dan sasaran pembuat kebijakan dan administrator adalah sumber nilai, karena semua orang yang memiliki

andil dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan terlibat dalam perumusan tujuan dan sasaran yang akan diukur kinerjanya.

Menurut uraian teknik evaluasi yang diberikan di atas, para peneliti menggunakan strategi evaluasi formal karena penilaian formal memungkinkan mereka untuk memiliki pemahaman menyeluruh tentang tujuan program. Selain itu, metodologi ini mendukung topik kajian yang telah ditetapkan peneliti untuk mencirikan terjadinya kesulitan.

## **2.4 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)**

### **2.4.1 Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 yang mengatur tentang UMKM mendefinisikan UMKM di Indonesia (Tambunan, 2009). UU 20 Tahun 2008 mendefinisikan UMKM sebagai usaha produktif yang dimiliki oleh orang atau badan usaha perseorangan (Elizar Tanjung Elizar & Tanjung, 2018). Dari berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa UMKM adalah usaha yang dijalankan oleh perorangan atau kelompok yang memenuhi kriteria pelaku usaha mikro yang berperan penting bagi Negara.

### **2.4.2 Klasifikasi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)**

Dengan menggunakan kriteria kewirausahaan, UMKM dapat dibagi menjadi empat bagian (Partomo, 2008) yaitu:

*a) Livelihood Activities*

Biasanya, UMKM jenis ini berusaha mencari nafkah. Kumpulan pelaku usaha ini kurang memiliki jiwa kewirausahaan. Kategori ini dikenal sebagai sektor informal. Di Indonesia, kelompok ini memiliki jumlah UMKM terbesar. Misalnya pedagang kaki lima.

*b) Micro Enterprises*

UMKM ini biasanya berupa artisan (pengrajin) dan tidak memiliki jiwa kewirausahaan. Jumlah UMKM ini di Indonesia relatif besar.

c) *Small Dynamic Enterprises*

Kategori UMKM ini seringkali menunjukkan semangat giat. Banyak pengusaha skala menengah dan besar sebelumnya muncul dari kelompok ini. Beberapa UKM dalam kelompok ini akan mencapai kategori keempat jika dikembangkan dengan tepat. Kelompok UMKM ini jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan UMKM kategori 1 dan 2. Organisasi UMKM ini sudah dapat menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.

d) *Fast Moving Enterprises*

UMKM ini memiliki jiwa kewirausahaan yang sebenarnya. Dari kelompok ini akan muncul perusahaan besar dan menengah. Kategori ini secara signifikan lebih kecil dari kategori 1 dan 2.

### **2.4.3 Kriteria Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)**

Pengertian UMKM menurut Undang-Undang Nomor 20 Pasal 1 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

1. Usaha Mikro

Termasuk dalam definisi UMKM adalah usaha mikro atau korporasi dengan aset usaha bersih bulanan sekitar \$50 juta. Dalam jenis usaha ini tidak termasuk uang dalam bentuk bangunan atau perusahaan tempat badan usaha itu berkantor pusat. Usaha mikro antara lain adalah warung kelontong, peternak ayam, peternak lele, tukang cukur, warung nasi, dan perusahaan lain yang sejenis.

2. Usaha Kecil

Usaha kecil yang dikelola oleh perorangan tetapi bukan badan usaha memenuhi syarat sebagai UMKM. Di bawah 300 juta per tahun adalah kekayaan bersih usaha kecil yang dihitung dengan sempurna. Ini termasuk industri kecil, koperasi, minimarket, dan department store.

3. Usaha Menengah

Badan usaha memenuhi syarat sebagai usaha menengah jika pendapatan bersih bulanan atau total asetnya melebihi 500 juta.



Namun perhitungan ini tidak termasuk aset berupa tanah dan bangunan sebagai tempat usaha. Usaha menengah termasuk operasi perkebunan, perusahaan ekspor-impor, misi angkutan laut, dan sejenisnya.

Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2008 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki kriteria usaha sebagai berikut :

**Tabel 3**  
**Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

No	Uraian	Kriteria	
		Asset	Omzet
1	Usaha Mikro	Maks. 50 Juta	Maks. 300 Juta
2	Usaha Kecil	>50 Juta – 500 Juta	>300 Juta – 2,5 Miliar
3	Usaha Menengah	>500 Juta – 10 Miliar	>2,5 Miliar – 50 Miliar

*Sumber: UU Nomor 2 Tahun 2008*

#### **2.4.4 Ciri dan Karakteristik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

Menurut (Koerniawati, 2009) Usaha Mikro dicirikan oleh beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Jenis barang atau komoditas bisnis tidak selalu stabil, dan lokasi keempat perusahaan dapat bervariasi; sumber daya manusia kurang memiliki jiwa kewirausahaan yang memadai.
2. Belum melakukan pengelolaan keuangan dasar sekalipun, tidak membedakan dana pribadi dan perusahaan, serta rata-rata berpendidikan relatif rendah.
3. Secara umum, mereka tidak memiliki akses ke layanan perbankan, meskipun beberapa memiliki akses ke lembaga keuangan non-bank; mereka juga tidak memiliki izin perusahaan dan persyaratan hukum lainnya, termasuk NPWP.

Menurut (Koerniawati, 2009) Usaha kecil dicirikan oleh beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Jenis perusahaan atau produk yang dibudidayakan seringkali sulit diubah, dan lokasi perusahaan biasanya tetap dan tidak bergerak.
2. Secara umum, administrasi keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dari keuangan keluarga, neraca usaha sudah dibuat, izin usaha dan persyaratan hukum lainnya, termasuk NPWP, sudah ada, dan SDM memiliki pengalaman wirausaha.
3. Sebagian dari mereka sudah memiliki akses ke bank dalam hal permodalan, namun sebagian besar dari mereka belum mampu menerapkan praktik manajemen usaha yang kuat, seperti *business planning*.

Menurut (Koerniawati, 2009) Secara umum ciri-ciri usaha menengah meliputi beberapa hal, yaitu:

1. Secara umum memiliki administrasi dan struktur yang unggul, lebih kekinian lagi dengan pembagian tugas yang jelas, dan secara konsisten menerapkan sistem akuntansi pengelolaan keuangan.
2. Telah membuat peraturan atau organisasi ketenagakerjaan dan manajemen, menyediakan Jamsostek, perawatan kesehatan, dll.
3. Telah memenuhi semua persyaratan hukum, seperti izin tetangga, izin usaha, izin lokasi, NPWP, dan inisiatif pengelolaan lingkungan.
4. Memiliki akses cepat ke sumber pembiayaan keuangan dan personel yang biasanya terdidik dan terampil.

#### **2.4.5 Kekuatan dan Kelemahan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)**

UMKM memiliki kekuatan potensial yang dapat menjadi pilar untuk pembangunan di masa depan. Menurut (Putri, 2019), peluang berikut tersedia untuk UMKM:

- a) Sarana Meratakan Perbedaan Ekonomi UMKM berperan dalam meratakan status ekonomi masyarakat karena berada di berbagai lokasi, bahkan di pelosok.

- b) Cara Penanggulangan Kemiskinan Karena tingkat penyerapan tenaga kerja yang cukup tinggi, UMKM berperan dalam mengentaskan kemiskinan.
- c) Sumber Penerimaan Devisa Negara Usaha kecil dan menengah (UKM) berkontribusi terhadap cadangan devisa negara karena pasarnya bersifat internasional.

Kelemahan UMKM adalah kurangnya keterampilan SDM dalam berwirausaha dan manajemen, yang menyebabkan ketidakefisienan dalam menjalankan prosedur bisnis. Ada juga masalah kendala keuangan yang menghambat pertumbuhan kewirausahaan. Ketidakmampuan faktor pasar, pemahaman produksi dan teknologi yang kurang, sarana dan prasarana, serta ketidakmampuan menguasai informasi, merupakan kelemahan umum lainnya di kalangan UMKM (Hubeis, 2009)

## **2.5 Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM)**

Program (BPUM) memberikan bantuan kepada UMKM di Indonesia. Bantuan sosial dengan nominal Rp. 2.400.00 ini akan diberikan kepada sekitar 12,8 juta pelaku usaha. Bantuan ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mengelola suatu perusahaan, baik untuk menambah modal maupun menjual barang-barang UMKM. BPUM merupakan salah satu upaya pemerintah untuk membantu dan menjaga kelangsungan usaha para pelaku usaha mikro yang menghadapi tekanan akibat Covid-19 dengan menerbitkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 6 Tahun 2020 sebagai pedoman umum penyaluran bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dalam menghadapi ancaman yang membahayakan ketahanan nasional.

Persyaratan pelaku usaha mikro penerima BPUM:

1. Warga Negara Indonesia (WNI)
2. Mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK)
3. Memiliki usaha mikro

4. Bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI/POLRI, serta pegawai BUMN/BUMD
5. Tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan dan KUR
6. Bagi pelaku usaha mikro yang memiliki KTP dan domisili usaha yang berbeda, dapat melampirkan Surat Keterangan Usaha (SKU) atau Nomor Induk Berusaha (NIB)

Calon penerima Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) dapat melengkapi data usulan kepada pengusul, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

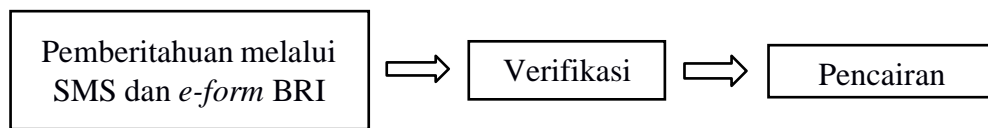
1. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
2. Nama lengkap
3. Alamat tinggal sesuai KTP
4. Bidang usaha
5. Nomor Telepon

Pengusul BPUM meliputi:

1. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi/Kabupaten/Kota
2. Koperasi yang telah disahkan
3. Kementrian atau Lembaga
4. Perbankan dan perusahaan pembiayaan yang terdaftar Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
5. Lembaga penyalur program kredit pemerintah (BUMN/BLU)

Setelah Kementerian Koperasi dan UKM membersihkan dan memvalidasi data, Otoritas Pengguna Anggaran (KPA) akan menentukan pelaku usaha mikro mana yang berhak mendapatkan BPUM dan menyalurkan dananya langsung ke rekening penerima BPUM atau melalui bank penyalur BPUM. Karena (BPUM) ini merupakan hibah dan bukan pinjaman atau kredit, maka tidak ada biaya administrasi dan pengembalian, dan penerima manfaat tidak dipungut biaya apapun untuk penyaluran Banpres Produktif Usaha Mikro kepada pelaku usaha mikro.

**Gambar 2**  
**Alur Pencairan Dana BPUM**



*Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung, 2021*

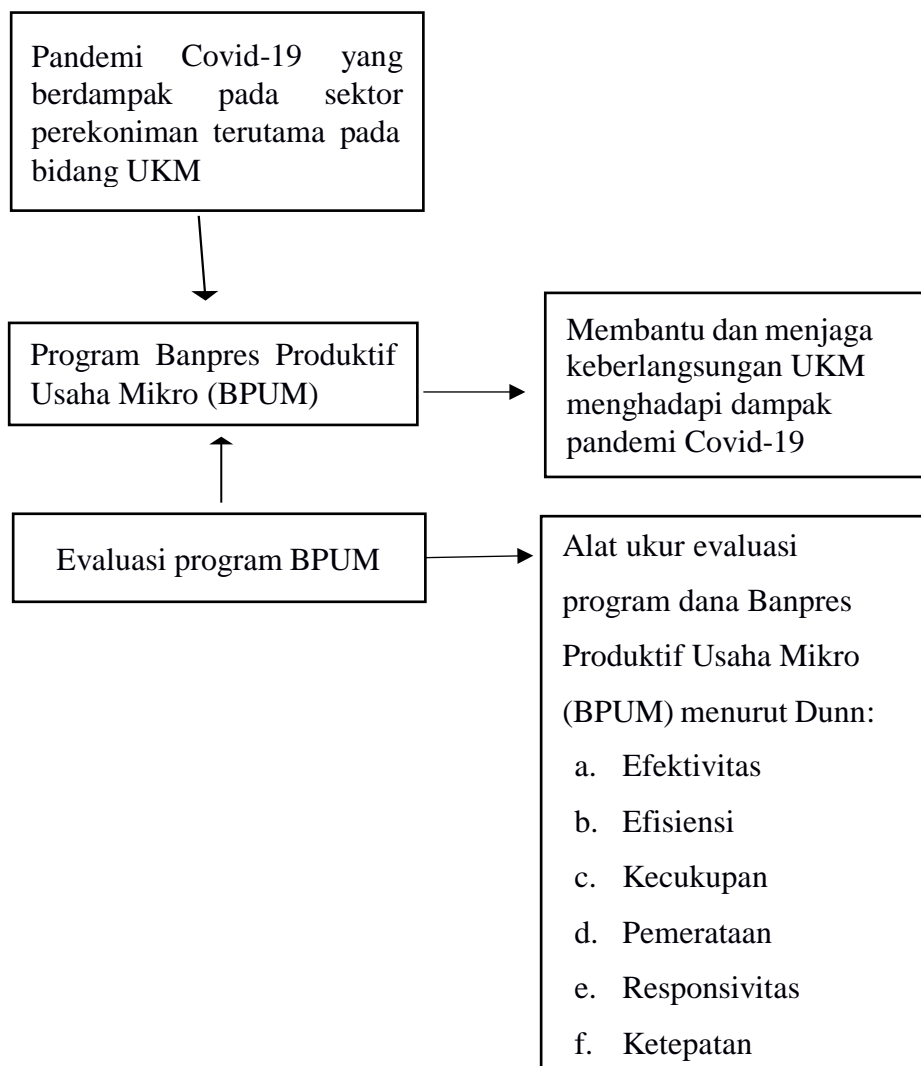
## 2.6 Kerangka Pemikiran

Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung merupakan bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung. Berlandaskan Keputusan Walikota 59 Tahun 2016 tentang tugas, fungsi, dan tata kerja dinas bahwa Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung merupakan salah satu unsur otonomi daerah di bidang Koperasi dan UKM. Diharapkan mampu menyelenggarakan beberapa urusan pemerintahan di bidang koperasi dan UKM, antara lain pelebagaan dan pengawasan, pemberdayaan dan pengembangan koperasi, serta pemberdayaan usaha mikro.

Munculnya Covid-19 di dunia berdampak pada seluruh sektor di dunia termasuk pada sektor ekonomi. Oleh sebab itu, Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia melaksanakan program untuk membantu para pelaku usaha di Indonesia agar tetap bertahan di masa pandemic dengan mengadakan program BPUM. Untuk melihat pencapaian tujuan dari program BPUM, maka perlu dilakukan pengukuran evaluasi mengenai program tersebut, yaitu:

1. Efektivitas, atas direncanakan hasil yang telah dicapai
2. Efisiensi, biaya produk atau layanan
3. Kecukupan, seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah yang ada
4. Pemerataan, apakah program BPUM dapat dirasakan oleh seluruh pelaku usaha di Kota Bandar Lampung yang mengikuti program tersebut dan apakah penerima sudah tepat sasaran
5. Responsivitas, apakah hasil kebijakan program BPUM memuaskan
6. Ketepatan, apakah hasil manfaat program BPUM.

**Gambar 3**  
**Kerangka Pemikiran**



*Sumber: Diolah oleh peneliti, 2021*

### **III.METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif digunakan untuk penelitian ini. Peneliti memakai metode kualitatif karena ingin menggambarkan dan memperoleh pemahaman yang komprehensif dan mendalam dengan menggambarkan kondisi atau fenomena yang sebenarnya terjadi selama penelitian lapangan dengan mengajukan pertanyaan terbuka kepada informan. Kemudian peneliti ingin menganalisis informasi atau data mengenai program dana Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) bagi pelaku UMKM di Kota Bandar Lampung tahun 2021 sehingga dapat mengevaluasi program tersebut. Dalam penelitian deskriptif, upaya dilakukan untuk mengkarakterisasi gejala, kejadian, atau kejadian yang telah terjadi. Alih-alih angka, data yang diperoleh terdiri dari kata-kata dan gambar. Data berasal dari penelitian langsung, catatan ilmiah, dan dokumen resmi lainnya.

#### **3.2 Fokus Penelitian**

Untuk tujuan menyempurnakan dan membatasi penelitian, peneliti kualitatif memutuskan ruang lingkup penelitian mereka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membatasi penyelidikan kualitatif serta penelitian untuk menentukan fakta mana yang relevan dan mana yang tidak relevan. Keterbatasan penelitian kualitatif sebagian besar ditentukan oleh kedalaman penyelidikan.

Adapun fokus penelitian meliputi evaluasi program dana BPUM bagi pelaku UMKM di Kota Bandar Lampung. Sementara untuk melakukan evaluasi implementasi kebijakan tersebut maka peneliti memilih teori Dunn

sebagai alat ukur evaluasi program dana BPUM bagi pelaku UMKM di Kota Bandar Lampung.

Pelaksanaan evaluasi program dana BPUM bagi pelaku UMKM di Kota Bandar Lampung yang diukur melalui beberapa indikator ketepatan, yakni:

1. Efektivitas, dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan
2. Efisiensi, seberapa efisien program BPUM
3. Kecukupan, seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah yang ada
4. Pemerataan, apakah program BPUM dapat dirasakan oleh seluruh pelaku usaha di Kota Bandar Lampung yang mengikuti program tersebut dan apakah penerima sudah tepat sasaran
5. Responsivitas, apakah hasil kebijakan program BPUM memuaskan
6. Ketepatan, keberhasilan suatu kebijakan yang benar-benar tercapai

### **3.3 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini mengambil lokasi di Kota Bandar Lampung. Lokasi ini dipilih karena penulis menemukan permasalahan terkait adanya program Bantuan Presiden Usaha Mikro (BPUM) di Kota Bandar Lampung yang melalui Dinas Koperasi dan UKM sebagai perantara program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM).

### **3.4 Jenis dan Sumber Data**

Dalam penelitian kualitatif, sumber datanya adalah kata-kata dan tindakan; sisanya terdiri dari data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan langsung dari informan, sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian sebelumnya.



a) Data Primer

Wawancara yang dilakukan langsung di lokasi penelitian atau di lapangan memberikan data primer. Metode pengumpulan data yang memperoleh informasi dari sumber data secara langsung melalui pertanyaan atau percakapan dengan satu atau lebih individu yang terkait dengan masalah penelitian.

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan strategi pengumpulan informasi dari sumber pustaka, seperti buku, jurnal, dan bahan lain yang berkaitan dengan topik kajian. Dokumen yang terkumpul kemudian dievaluasi, dibandingkan, dan digabungkan untuk menghasilkan analisis yang sistematis, kohesif, dan komprehensif.

Dalam penelitian ini, sumber data verbal utama terdiri dari wawancara dengan narasumber yang telah ditetapkan membahas berbagai permasalahan yang berkaitan dengan penyaluran pembiayaan program (BPUM) di Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung. Dalam penelitian ini sumber data sekunder meliputi informasi jumlah (UKM) di Kota Bandar Lampung, profil Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung, dan foto kegiatan pelaku usaha yang terdaftar BPUM di Kota Bandarlampung.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan strategi pengumpulan data berupa kata-kata dan pernyataan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Metode pengumpulan data penelitian ini meliputi:

1. Observasi

Menurut Marshall dalam (Sugiyono, 2017) menjelaskan bahwa *“through observation, the researcher learn about behavior and the*

*meaning attached to those behavior*”. Artinya, melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Sesuai yang dikatakan oleh Nasution, bahwa observasi merupakan sebuah dasar ilmu pengetahuan serta fakta yang digunakan untuk memperoleh data penelitian (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung program pengembangan bagi UMKM di Kota Bandar Lampung. Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti dengan melihat proses pendaftaran program BPUM di Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung serta peneliti membantu dalam merekap data pendaftar BPUM serta peneliti mendengar keluhan langsung dari para pelaku usaha mengenai program BPUM sehingga peneliti dapat mengevaluasi program BPUM.

## 2. Wawancara

Dalam penelitian kualitatif, wawancara mendalam berfungsi sebagai metode penyelidikan. Proses memperoleh informasi untuk tujuan penelitian berupa pertanyaan dan jawaban dari informan yang relevan disebut wawancara mendalam.

Wawancara ditujukan kepada pelaku usaha yang belum pernah mendapatkan, sudah pernah mendapatkan dan lebih dari satu kali mendapatkan dana Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM). Peneliti membuat kriteria wawancara dan menggunakannya untuk melakukan wawancara. Pertanyaan peneliti dalam pedoman wawancara disusun berdasarkan informasi yang dibutuhkan selama wawancara, sehingga diskusi tetap terbuka dengan tetap fokus pada topik kajian. Dari wawancara tersebut, peneliti dapat mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan untuk evaluasi Program Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) bagi UMKM di Kota Bandar Lampung.

Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah:

**Tabel 4**  
**Informan Penelitian**

No	Profesi
1	Ibu Noviana selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung
2	Bapak Azharul Huda selaku Kepala Seksi Fasilitasi Usaha Mikro pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung
3	Annisa Anastasya selaku Pelaku Usaha pot gerabah
4	Roswati selaku Pelaku Usaha Sembako
5	Angginie Putri selaku Pelaku Usaha Kecantikan atau <i>nailart</i>
6	Susana selaku Pelaku Usaha Pakaian atau <i>fashion</i>
7	Salmawati selaku Pelaku Usaha Kuliner
8	Galih Rahmadillah selaku Pelaku Usaha Otomotif
9	Gusti Dharma Yanti selaku Pelaku Usaha Herbal HPAI

*Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2021*

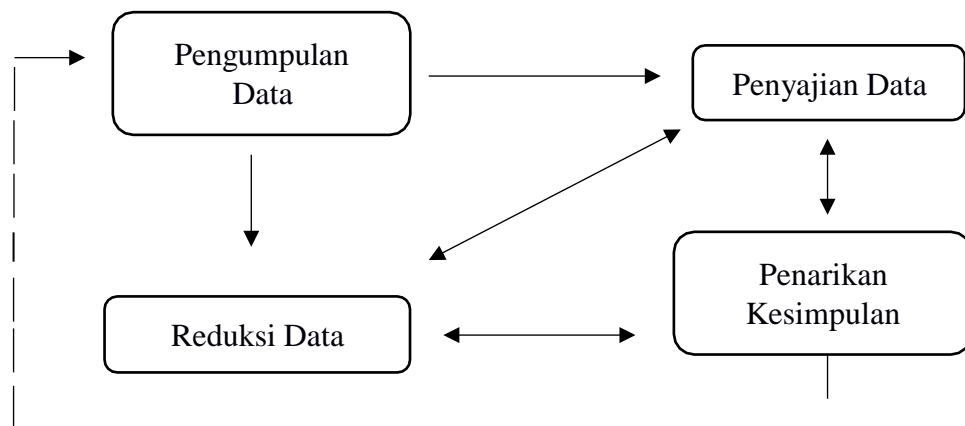
### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah penelitian berbasis data. Studi ini menggunakan dokumentasi untuk mendapatkan data pendukung, seperti lokasi penelitian, struktur organisasi, visi, tujuan, dan sejarah yang diteliti. Strategi ini memperoleh tinjauan literatur untuk mendukung penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini berarti, mengumpulkan data berupa dokumen atau laporan yang menunjang penelitian yang berkaitan dengan efektivitas pelaksanaan program pengembangan (UMKM) di Kota Bandar Lampung pada masa pandemi Covid-19 seperti peraturan perundang-undangan, website resmi Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, buku profil Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung serta berkas pendaftaran program BPUM.

### 3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman. Adapun Miles and Hubbard dalam (Sugiyono, 2017) bahwa kegiatan analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan dilanjutkan hingga data habis. Model ini menentukan langkah-langkah analisis data berikut:

**Gambar 4**  
**Teknik Analisis Data**



Sumber: Miles dan Huberman

a) Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data adalah kegiatan meringkas, menentukan hal-hal pokok, memfokuskan hal-hal yang penting sesuai dengan tema dan polanya serta membuang data-data yang tidak perlu dan tidak sesuai dengan pokok bahasan (Sugiyono, 2017). Sehingga dengan melakukan reduksi data, dapat mempermudah peneliti dalam menemukan dan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang pokok penelitian serta mempermudah peneliti mengumpulkan data selanjutnya.

b) Penyajian Data (*Data Display*)

Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2017) menjelaskan “*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*”. Artinya, penulisan naratif adalah bentuk penyajian data yang paling umum dalam penelitian kualitatif. Dengan menyajikan fakta, akan lebih mudah untuk memahami apa yang terjadi dalam hasil penelitian.

c) Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*)

(Sugiyono, 2017) menunjukkan bahwa kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dikemukakan pada awal penyelidikan, tetapi mungkin tidak dapat menjawab rumusan masalah saat ini. Hal ini disebabkan karena

masalah dan rumusan dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berubah setelah dilakukan kajian di lapangan. Namun, jika hasil studi awal dikonfirmasi oleh data berupa bukti yang andal dan konsisten ketika peneliti turun ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dicapai adalah kredibel atau dapat dipercaya. Untuk memastikan kredibilitas temuannya, peneliti akan memberikan fakta pendukung yang akurat saat menggambarinya.

### **3.7 Teknik Keabsahan Data**

Keabsahan data berarti mengetahui validitas dari suatu data yang disajikan, Menurut Sugiyono (2017), dalam penelitian kualitatif validitas ialah derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian atau data yang sesungguhnya dengan data yang disajikan oleh peneliti. Sehingga dalam penelitian ini yang diuji adalah data yang diperoleh peneliti. Untuk itu terdapat beberapa Teknik uji keabsahan data menurut Sugiyono (2017) seperti:

#### **a. Uji Kredibilitas Data**

Uji kredibilitas data dimaksudkan untuk menanamkan keyakinan terhadap temuan penelitian yang diperoleh melalui triangulasi data. Triangulasi digambarkan sebagai metode pengumpulan data yang mengintegrasikan banyak metode pengumpulan data dengan sumber-sumber yang ada. Jika seorang peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan triangulasi, dia mengumpulkan data yang sekaligus memeriksa kehandalan data dengan menggunakan beberapa metodologi pengumpulan data dan sumber data.

##### **1. Triangulasi**

Triangulasi didefinisikan sebagai Teknik mengumpulkan data dengan cara penggabungan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Apabila data dikumpulkan oleh peneliti menggunakan triangulasi, maka peneliti sesungguhnya

telah mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu melakukan pengecekan kredibilitas data menggunakan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data (2013). Menurut Sugiyono (2013) terdapat 3 cara triangulasi, yaitu triangulasi waktu, triangulasi teknik, dan triangulasi sumber.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan cara pengujian data dengan cara triangulasi teknik, yaitu menggunakan lebih dari satu informan dan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang sama. Peneliti memperoleh data dengan mewawancarai beberapa pelaku usaha terkait dengan program BPUM di Kota Bandar Lampung. Di samping itu, peneliti juga menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu teknik wawancara dan observasi untuk menggali data tentang hasil dari adanya program BPUM yang dilaksanakan di Kota Bandar Lampung.

*b. Uji Transferability*

*Transferability* merupakan validitas ekseternal dalam penelitian kualitatif, validitas ini menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya kedalam populasi penelitian dimana sampel tersebut diambil. Pada dasarnya, *transferability* adalah validitas eksternal penelitian. Tujuan dari transformasi ini adalah untuk membantu orang lain memahami hasil penelitian. Peneliti perlu memberikan penjelasan yang detail, jelas, sistematis, dan terpercaya saat membuat laporan.

*c. Uji Dependability*

Pada penelitian kualitatif, *dependability* juga disebut reliabilitas. Suatu penelitian yang reliabel adalah jika orang lain mampu mereplikasi proses penelitian tersebut. Uji *dependability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Proses ini dilakukan oleh pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian.

d. Uji *Confirmability*

Dalam penelitian kualitatif, uji *confirmability* disebut juga dengan uji objektivitas dalam penelitian. Penelitian yang objektif bila hasil penelitian tersebut telah disepakati banyak orang. Dalam uji *confirmability* berarti mengaitkan hasil penelitian dengan proses yang dilakukan. Uji konfirmabilitas dapat diperoleh dengan persetujuan dari beberapa orang, termasuk dosen pembimbing, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan fokus penelitian, dalam hal ini data yang dibutuhkan.

## **V. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1 Kesimpulan**

Dari hasil penelitian maka disimpulkan bahwa pelaksanaan program BPUM Tahun 2021 telah responsiv dan kecukupan karena program BPUM sangat berperan dalam pengembangan dan permasalahan UMKM dan sumber daya telah memadai sehingga pelaku usaha merespon dengan baik adanya program BPUM namun pada pelaksanaan program BPUM tidak efektif, tidak efisien, tidak merata dan tidak tepat karena tidak adanya sistem monitoring, data dan dokumentasi yang tidak jelas untuk mengetahui ketercapaian program BPUM yang mengakibatkan tujuan sasaran dari program BPUM belum dapat menyentuh seluruh pelaku usaha serta masih terdapat penggunaan dana BPUM yang tidak tepat dan tidak jelas.

### **5.2 Saran**

Merujuk pada hasil penelitian, masukan yang diberikan mengenai evaluasi program dana Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) bagi pelaku UMKM Kota Bandar Lampung pada tahun 2021 ialah:

- a) Prioritas penggunaan dana anggaran program BPUM harus ditinjau dan diberikan landasan hukumnya, sekurang-kurangnya di tingkat Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. Sehingga, distribusi BPUM lebih efisien serta mempunyai standar penggunaan dana BPUM yang jelas, yang dirancang untuk membantu pemeliharaan usaha yang terkena dampak Covid-19 dan bukan untuk kepentingan pribadi.
- b) Dilakukannya proses monitoring yang jelas kepada penerima dana BPUM.



- c) Jika program BPUM dilanjutkan kembali maka harus dievaluasi dan diperbaiki kembali oleh para *stakeholder* yang terlibat terutama pada Kementrian Koperasi dan UKM Republik Indonesia dengan lebih memperhatikan pelaku usaha yang berhak menerima bantuan dan tidak adanya pemalsuan data serta tidak adanya tumpang tindih data yang mengakibatkan program BPUM penyalurannya tidak merata.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ag. Subarsono ; Dimaswids. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori Dan Aplikasi / Ag. Subarsono* .2013
- Budi Winarno, 1947-; Tri Admojo. (2014.). *Kebijakan publik : teori, proses, dan studi kasus / Budi Winarno ; penyunting, Tri Admojo*. Yogyakarta :: CAPS,.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. InGadjah Mada University Press (pp. 607–631). <http://journal.unhena.ac.id/index.php/HibSos/article/view/99/81>
- Inu Kencana Syafie. (2006). *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Musa Hubeis. (2009). *Prospek usaha kecil dalam wadah inkubator bisnis / Musa Hubeis*. Jakarta :: Ghalia Indonesia,.
- Partomo, T. S. (2008). *Ekonomi Koperasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia,.
- Riant Nugroho. (2012). *Publik Policy*. Jakarta: Kompas Gramedia,.
- Sedarmayanti. (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung: Refika Aditama,.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surjadi. (2009). *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*. Bandung: Refika Aditama,.
- Tambunan, Tulus T.H.; Akhria Nazwar. (2009). *UMKM di Indonesia / Tulus T.H. Tambunan ; editor, Akhria Nazwar*. Bogor :: Ghalia Indonesia,.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. (2003). *Kebijakan publik yang membumi* (cet. 1.). Yogyakarta: Lukman,.
- Tangkilisan, Hessel Nogi. (2005). *Manajemen Publik*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana,.
- Widyoko, E.P. (2012). *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Wirawan. (2011). *Evaluasi : teori, model, standar, aplikasi, dan profesi / Wirawan*. Jakarta :: Rajawali Press,.
- Carlis Y. (2011). *Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Komitmen Organisasional Pada RSUD Kabupaten Aceh Tamiang*. Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara.

- Budiani, N. W. (2017). Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi Dan Sosial (INPUT)*, 2(1),49–57.
- Dan, K., Di, U. K. M., & Kutai, K. (2014). *Evaluasi Kebijakan Program Pinjaman Modal Kredit Bergulir Untuk Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pada Dinas*. 2(3), 1328–1340.
- Dunn, W. N. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua. In *Gadjah Mada University Press* (pp. 607–631). <http://journal.unhena.ac.id/index.php/HibSos/article/view/99/81>
- Elizar, E., & Tanjung, H. (2018). Pengaruh Pelatihan, Kompetensi, Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Pegawai. *Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen*, 1(1), 46–58. <https://doi.org/10.30596/maneggio.v1i1.2239>
- Kastaman, R. (2011). *EVALUASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN UKM DI KOTA BANDUNG MELALUI PROGRAM BANTUAN WALIKOTA UNTUK KEMAKMURAN ( Bawaku Makmur )*. 327–335.
- Lestari, P., & Taufiq, A. (2016). Evaluasi Implementasi Kebijakan Pemberdayaan USAha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Kudus. *Journal of Politic and Government* .... <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/13633%0Ahttps://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/download/13633/13187>
- Masruri. (2017). Masruri M.IP. *Journal of Governance and Public Policy*, 4 No.
- Susilawati, S., Falefi, R., & Purwoko, A. (2020). Impact of COVID-19’s Pandemic on the Economy of Indonesia. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 3(2),1147–1156. <https://doi.org/10.33258/birci.v3i2.954>

Peraturan Resmi:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi Covid-19

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Kriteria UMKM

Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung

Website Resmi:

Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia, “Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB)”, dikutip dari website <https://www.kemenkopukm.go.id/data-umkm>

Kementrian Keuangan Republik Indonesia, “Pemerintah Terus Perkuat UMKM Melalui Berbagai